

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nuklir masih menjadi topik perbincangan dan perdebatan diantara negara-negara dunia. Dulu nuklir dibicarakan pada masa Perang Dingin dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling beradu senjata militer sebagai cara untuk menjadi negara mana yang lebih kuat. Sampai sekarang nuklir masih menjadi favorit bagi negara-negara Dunia terkhusus negara Iran, walaupun penggunaannya dilarang keras oleh Badan Internasional. Namun tetap saja nuklir di atas namakan sebagai trobosan sumber energi. Iran sebagai negara yang berdaulat mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Akan tetapi pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran mendapat tekanan dari dunia internasional terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Tekanan yang diterima oleh Iran tersebut memunculkan perdebatan yang menyatakan bahwa pengembangan nuklir Iran bertujuan untuk pembuatan senjata nuklir. Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pemerintah Iran dalam meyakinkan dunia internasional melalui IAEA terkait isu nuklir Iran. *International Atomic Energy Agency* (IAEA) merupakan badan atom internasional yang khusus menangani negara-negara di dunia yang mengembangkan sektor nuklir. IAEA dibentuk pada tahun 1957 dan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Negara Iran secara resmi bergabung dan

menjadi anggota IAEA pada tahun 1957.¹ IAEA berkontribusi untuk menggalakkan perdamaian dunia, menjaga keamanan dunia, mencegah penyebaran senjata nuklir, dan mendukung serta membantu pengembangan teknologi nuklir untuk keperluan sipil.² Dalam menjalankan fungsinya, IAEA memiliki kewajiban untuk mengontrol negara-negara yang memiliki nuklir. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan aman dan tidak mengarah kepada pengembangan senjata nuklir. Oleh karena itu IAEA berhak memeriksa pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh negara-negara anggota IAEA.³

Sebagai penunjang kegiatan IAEA dalam menjalankan tugasnya, maka dibuat suatu kesepakatan terhadap negara-negara pengembang energi nuklir yang tujuannya untuk menjaga keamanan dunia. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama *Non-Proliferation Treaty* (NPT).⁴ NPT ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968, yang dicetuskan oleh Irlandia melalui Menteri Luar Negerinya Frank Aiken. NPT mulai berlaku sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan 40 negara lainnya. Hingga saat ini tercatat sebanyak 189 negara yang telah dan masih terikat dengan traktat tersebut.⁵ Dalam traktat tersebut negara-negara pengembang nuklir dikelompokkan menjadi dua yaitu *Nuclear Weapon States* (NWS) dan *Non-Nuclear Weapos*

¹ Joseph J MacAvoy, *Nuclear Space and the Earth Environment: The Benefits, Dangers, and Legality of Nuclear Power and Propulsion in Outer Space*, William & Mary Environmental Law and Policy Review. 191 (2004). <http://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol29/iss1/6>

² Ekpi Yossara Simbolon, 2014, peranan international atomic energy agency untuk mengawasi program nuklir iran dalam kaitannya dengan implementasi joint plan of action 2013, hal 21 <https://media.neliti.com/media/publications/15007>

³ Ibid hal 21

⁴ M. Syaiful Bahri, 2012, penolakan pemerintah iran terhadap international atomic energy agency (IAEA) untuk melakukan pemeriksaan pengembangan energi nuklir di wilayah negara iran ditinjau dari perspektif statuta IAEA. Hal 28. <https://media.neliti.com/media/publications/34823>

⁵ ..., sejarah dan perkembangan program nuklir korea utara, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22270/6>.

States (NNWS). NWS yaitu negara yang berhak memiliki senjata nuklir. Negara yang tergolong NWS terdapat sebanyak lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina. Sementara itu NNWS yaitu negara yang tidak berhak memiliki senjata nuklir, salah satunya adalah Iran. Negara yang tergolong dalam NNWS adalah negara yang meratifikasi traktat NPT selain NWS. Traktat NPT terdiri dari 11 pasal yang harus dipatuhi oleh negara anggota IAEA yang meratifikasi traktat NPT tersebut.⁶ Dari 193 negara yang menandatangani perjanjian tersebut termasuk Iran juga meratifikasi pada tahun 1970. Selain meratifikasi NPT, Iran juga menandatangani *Safeguard Agreement* IAEA tahun 1974 yang merupakan badan pengawas Nuklir dunia. Iran sendiri salah satu negara yang menegembangkan Nuklir itu sendiri melalui kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat.⁷

Masalah proliferasi nuklir Iran dimulai ketika pada tahun 2002 kelompok oposisi *National Council of Resistance of Iran* (NCRI), mengungkapkan adanya program nuklir rahasia, termasuk pembangunan pabrik pengayaan uranium di Natanz dan reaktor air berat di Arak.⁸ Pengayaan uranium dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir, dan bahan bakar bekas dari reaktor air berat yang berisi plutonium dapat digunakan untuk membuat bom. Iran diduga tidak mematuhi NPT *Safeguards Agreement*, sehingga kecurigaan mengarah pada adanya upaya

⁶ Alifah Fanny Fadhilah, 2019, penyalahgunaan penggunaan uranium untuk bahan baku senjata nuklir dalam perspektif perjanjian non-proliferasi nuklir. https://repository.unsri.ac.id/15201/1/RAMA_74201_0201138152027_0029075706_0001027402_01_FRONT_REF.

⁷ Estri Hardianti, kebijakan Uni Eropa dalam menghentikan Proliferasi nuklir Iran tahun 2009-2013, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28163/1>

⁸ International Institute for Strategic Studies, *Iran's Strategic Weapons Programmes: A Net Assessment*, (London: Routledge, 2005), Hlm. 16.

Iran untuk melangkah lebih jauh dan mengaya uranium ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Iran telah menandatangani *Non Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1968 sebagai negara non-senjata nuklir dan meratifikasinya pada tahun 1970.⁹ Hal tersebut berarti bahwa semua kegiatan nuklir harus dilakukan dengan cara yang transparan kepada masyarakat internasional, dan berada di bawah kontrol penuh dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA).¹⁰ Namun sebaliknya, Iran terus menolak untuk melakukan kewajiban internasionalnya dan enggan bersikap kooperatif dengan IAEA. Selama ini, pemerintah Iran menyatakan bahwa instalasi nuklirnya dibangun sepenuhnya untuk tujuan damai dan tidak pernah berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun, ketika IAEA melakukan inspeksi terhadap Iran, IAEA tidak dapat mengkonfirmasi pernyataan Iran tersebut. Sejauh ini, belum ada satu pihakpun yang mampu mengkonfirmasi bahwa nuklir Iran benar-benar bersifat damai.¹¹ Orientasi dan politik luar negeri Iran pasca revolusi Iran pada tahun 1979 cenderung konfrontasional terhadap Barat, Iran berupaya menghindari intervensi Barat dengan membangun hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan Cina. Dan seringkali menentang kebijakan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang cenderung *double-standar*. Hal ini membuat dunia internasional memberikan reaksinya terutama Amerika Serikat beserta negara-

⁹ Nuclear Threat Initiative, Iran: Nuclear, (terakhir diperbarui pada tahun 2015)

<http://www.nti.org/country-profiles/iran/nuclear/>

¹⁰ Duivy Andra Girsang, 2019, kebijakan amerika serikat terhadap sanksi kepada iran terkait pengembangan senjata nuklir ditinjau dari hukum internasional,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25705/130200548>

¹¹ Hikmatul Akbar, Pinilih Kodimerinda, pengembangan nuklir iran dan diplomasi kepada IAEA

http://repository.upnyk.ac.id/8162/2/Hikmatul_Akbar_Kodimerinda_Nuklir_Iran

negara yang tergabung dalam NWS (*Nuclear Weapon States*) yang diakui kepemilikan nuklirnya oleh NPT.¹²

Bagi Amerika Serikat, Iran dianggap sebagai negara yang sangat agresif yang masih di kuasai oleh rezim yang fanatic dan radikal dan bukan tidak mungkin Iran akan memperkaya Uranium nya menjadi hulu ledak. Hal ini berdasarkan laporan badan IAEA, Iran telah memproduksi uranium sebanyak 20% untuk program TRR(*Tehran research reactor*).¹³ Penolakan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium menghasilkan tekanan dari dunia internasional khususnya negara-negara Barat. Bagi Amerika Serikat pengembangan nuklir Iran merupakan suatu ancaman bagi stabilitas dunia yang multipolar dan dikhawatirkan dapat menjadi bola salju kepemilikan senjata nuklir di seluruh penjuru dunia khususnya Negara *the axis of evil* seperti Venezuela yang dapat membawa dunia pada perang dunia ke 3 yakni perang nuklir. Nuklir Iran juga akan mereduksi kepentingan AS dan mengancam dominasi barat dalam politik keamanan kawasan Timur Tengah yang memiliki nilai strategis dalam politik dunia.¹⁴

Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Uni Eropa, dikenal sebagai P5 + 1 atau E3 / EU + 3 , mencapai kesepakatan bersejarah

¹² ..” penulis Rahmat hindiarta Kususma “ politik luar negeri Iran pasca imam Khomeini : study kasus atas pemerintahan presiden Khatami dalam penciptaan Confidence-Building Measures (CBMs) terhadap negara-negara GCC, <http://lib.ui.ac.id/file>

¹³ ..., program pengembangan nuklir iran dan implikasinya terhadap hegemoni amerika serikat di kawasan timur tengah, <http://repository.unpas.ac.id>

¹⁴ Julian Borger, *The Guardian*, "Iran nuclear deal reached in Vienna," July 14, 2015 <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/iran-nuclear-deal-expected-to-be-announced-in-vienna>

dengan Iran mengenai pengembangan program nuklirnya pada 14 Juli 2015.¹⁵ Sebuah perjanjian yang secara resmi dikenal sebagai *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*, kesepakatan tersebut menekankan pada upaya-upaya pembatasan terhadap program nuklir Iran dan mekanisme pencabutan sanksi ekonomi Iran sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.¹⁶ Iran merupakan salah satu negara yang cukup lama dalam mengembangkan energi nuklir. Usaha pengembangan nuklir Iran dimulai pada masa pemerintahan Shah Pahlevi. Pada masa pemerintahan Shah Pahlevi tersebut mulai dilakukan penelitian dan pengembangan nuklir di Iran dengan bantuan Amerika Serikat.¹⁷

menanggapi tindakan Iran tersebut, maka Amerika Serikat berusaha menghentikan program nuklir Iran dengan menjatuhkan sanksi kepada Iran. Kemudian melalui kesepakatan *Teheran Agreement* dengan Inggris, Perancis, dan Jerman yang dicapai pada tahun 2003, Iran bersedia menghentikan program nuklirnya secara sementara. Pada masa pemerintahan presiden Iran Ahamadinejad periode 2005-2015 meninggalkan kesepakatan *Teheran Agreement* untuk memulai kembali program nuklir tersebut, sehingga membuat ketiga negara Uni Eropa dan Amerika Serikat melalui IAEA untuk melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB. Pada tahun 2006 Iran pun dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB, karena dinilai telah melanggar perjanjian tersebut. Dengan demikian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi sanksi untuk menghentikan Iran dalam menjalankan program nuklirnya tersebut, diantaranya

¹⁵ Laurance Norman and Jay Solomon, *Wall Street Journal*, "Iran, World Powers Reach Nuclear Deal," July 14, 2015 <https://www.wsj.com/articles/iran-world-powers-reach-nuclear-deal-1436861667>

¹⁶ Steve George, *CNN.com*, "*Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*" <https://edition.cnn.com/2018/05/09/tpts://edition.cnn.com/2018/05/09/middleeast/iran-deal-what-you-need-to-know-intl/index.html>

¹⁷ Kiki Mikail, Achmad Fathoni, 2019,

resolusi 1696 dan 1737 di tahun 2006, resolusi 1747 di tahun 2007, resolusi 1083 dan 1835 di tahun 2008, dan resolusi sanksi dari Amerika Serikat hingga mengeluarkan undang-undang *The Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of January 2013*.¹⁸ Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini menjadi penyebab utama berakhirnya kerja sama antara Amerika Serikat dan Iran.¹⁹ Revolusi Iran juga membuat hubungan antara Iran dan beberapa negara lain merenggang. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab ketidakpercayaan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap pengembangan nuklir Iran, sehingga Amerika Serikat memutus pasokan uranium kepada pusat penelitian Teheran.²⁰ Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Khomeini tersebut akan menghalangi kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Revolusi Islam Iran merupakan awal lepasnya Republik Islam Iran dari kontrol Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.²¹ Pada tahun 1984 pemerintah Iran melanjutkan pengembangan nuklir yang sempat terbengkalai sejak revolusi Iran. Ketika itu Iran telah memiliki sebanyak 5 reaktor penelitian nuklir dan akan menambah hingga 15 reaktor lagi. Iran berhasil menandatangani kerjasama nuklir jangka panjang dengan Pakistan pada tahun 1987 dan Cina pada 1990.²² Program pengembangan nuklir Iran ditentang oleh negara-negara besar di dunia

¹⁸ Penulis: Hamdan Basyar, 2010, sanksi baru untuk nuklir Iran
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/285-sanksi-baru-untuk-nuklir-iran.html>

19

11 Februari 2019, Beda Iran sebelum dan sesudah revolusi tahun 1979,

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47196869>

²⁰ Mustafa Kibaroglu, "Good For the Shah, Banned for the Mullahs: The West and Iran's Quest for Nuclear Power", <https://www.belfercenter.org/publication/good-shah-banned-mullahs-west-and-irans-quest-nuclear-power>

²¹ Enayatullah Yazdani dan Rizwan Hussain, *United States' Policy Towards Iran after the Islamic Revolution: An Iranian Perspective*, <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download>

²² Hikmatul Akbar, Pinilih Kodimerinda, pengembangan nuklir Iran dan diplomasi kepada IAEA. Hal 17. http://repository.upnyk.ac.id/8162/2/Hikmatul_Akbar_Kodimerinda_Nuklir_Iran.

yang dipromotori oleh Amerika Serikat dan Israel.²³ Program nuklir Iran merupakan ancaman bagi Israel yang merupakan satu-satunya negara non-muslim di kawasan Timur Tengah. Israel akan semakin terancam posisinya jika ada negara lain yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar, apalagi jika memiliki potensi tenaga nuklir. Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam jika posisi sekutunya, Israel, merasa terancam dengan keberadaan nuklir Iran. Pada bulan September 2003, *International Atomic Energy Agency* atau biasa disebut IAEA yang dipimpin oleh Mohamad El Baradei melakukan kunjungan ke Iran untuk meninjau langsung program nuklir Iran. Dalam kunjungan tersebut, IAEA menyatakan bahwa Iran dianggap gagal dalam melaksanakan perjanjian keamanan terkait program nuklir yang mereka miliki. Kegagalan tersebut terkait dengan beberapa hal yaitu menyembunyikan informasi terkait dengan desain bangunan dan konstruksi fasilitas milik Iran yang baru dibangun dan tidak adanya laporan terkait dengan pengolahan dan impor uranium ke IAEA.²⁴ Iran mengakui bahwa ada kesalahan dalam pelaporan beberapa progress program nuklir kepada IAEA. Oleh karena itu pemerintah Iran akan melaporkan semua aktivitas nuklir Iran secara transparan kepada IAEA. Amerika Serikat dan sekutunya semakin khawatir dengan program pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran. Kekhawatiran tersebut semakin memuncak dengan melancarkan ancaman kepada Iran. Ancaman tersebut bermula ketika adanya kecurigaan bahwa alasan pengembangan nuklir Iran sebagai upaya untuk menutupi program pengembangan senjata nuklir. Amerika Serikat beserta sekutunya Israel mengklaim bahwa kebutuhan Iran terhadap teknologi nuklir

²³ ..., hal 18 <http://scholar.unand.ac.id/59441/2/Bab%20I.pdf>

²⁴ Mohammad Ali Mousavi dan Yasser Norouzi, *Iran-US Nuclear Standoff: A Game Theory Approach*, *Iranian Review of Foreign Affairs*, <http://www.campaigniran.org/casmii/?q=node/9593>

tidak terlalu banyak. Sehingga Iran tidak perlu melakukan program pengayaan nuklir.²⁵

Berbagai upaya diplomasi telah digunakan oleh Amerika Serikat mengenai masalah nuklir Iran dengan menggunakan pendekatan *Hard Power* dalam bentuk sanksi, seperti sanksi di tahun 2002-20013 berupa embargo disektor ekonomi. Dan pendekatan *Soft Power* yaitu melalui jalur damai yang dimulai pada tahun 2006-2012 bersma Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Cina namun selalu mengalami kegagalan dalam menjalin kesepakatan dengan Iran.²⁶ Pada tahun 2015 Amerika Serikat kembali melakukan pendekatan *Soft Power* tanpa kekerasan dan melalui jalur damai dengan melakukan jalur diplomasi terhadap Iran dan tidak menemukan jalan sepakat dengan Iran.²⁷ Adapun diplomasi bilateral antara Amerika Serikat dengan Iran dimulai dari tahun 2013-2015, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengambil waktu untuk melakukan diskusi bilateral secara normal dengan Iran, yang pada saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Iran Muhamaad Zarif.²⁸ pertemuan bilateral antara Metri Luar negeri Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Iran menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Diplomasi Amerika Serikat dalam pemebentukan kesepakatan perjanjian nuklir JCPOA dengan Iran tahun 2013-2015, merupakan upaya damai yang digunakan Amerika Serikat, guna mencegah Iran menciptakan senjata nuklir. Diplomasi dilakukan secara bilateral Anantara Amerika Serikat

²⁵ Aldino Yoshitomo, 2017, kebijakan luar negeri amerika serikat terhadap pengembangan nuklir India dan Iran. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id>

²⁶ Resty Meiva Rizky, 2011, “perubahan kebijakan nuklir iran di era pemerintahan hassan rouhani” hal 16. <https://media.neliti.com/media/publications/32789>

²⁷ Penulis: Stela Claudia Henkey, 2021, diplomasi amerika serikat tentang perjanjian nuklir dalam pembentukan joint comprehensive plan of action dengan iran tahun 2013-2015 <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/04/1602045019>

²⁸ Elvina Yudith, “adaptasi pemerintahan Obama terhadap negara-negara besar terkait nukli Iran ” hal 13. <http://repository.unair.ac.id>

denga Iran dan tidak lagi memberikan sanksi baru kepada Iran. Iran melakukan pendekatan kepada IAEA yaitu dengan melayangkan surat yang berisi informasi bahwa Iran berkeinginan untuk meningkatkan pengayaan uranium hingga 5%. Iran tidak berhenti untuk memperjuangkan hak pengembangan nuklirnya. Terbukti bahwa Iran terus melakukan pendekatan pada negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Ahmadinejad dalam pidatonya di sidang umum PBB menyatakan bahwa nuklir Iran untuk kepentingan sipil.²⁹ Ahmadinejad yang digantikan oleh Hassan Rouhani pada tahun 2013 berusaha agar Iran mendapatkan persetujuan pemanfaatan energi nuklir. Untuk mendapatkan persetujuan nuklir, Iran melakukan diplomasi dengan IAEA dan negara-negara anggota IAEA, terutama dengan negara anggota Dewan Keamanan PBB. Iran berusaha memperoleh haknya untuk mengembangkan nuklir, awal keberhasilan diplomasi Iran adalah ketika juru runding Iran membuktikan bahwa program nuklir Iran bertujuan untuk damai dan menyatakan bahwa Teheran tidak memiliki ambisi untuk memproduksi senjata nuklir.³⁰ Keberhasilan Iran bermula dari kesepakatan Jenewa pada tanggal 24 November 2013. Keberhasilan Jenewa berhasil menghapuskan sanksi internasional di bidang ekonomi, politik dan hukum terhadap Iran. Namun pengembangan nuklir Iran belum mencapai sebuah kesepakatan bersama dan akan dibahas pada pertemuan di Wina. Pertemuan di Wina menghasilkan kesepakatan Wina merupakan hasil akhir dari perjuangan diplomasi Iran. Kesepakatan tersebut berhasil dicapai pada tanggal 14 Juli 2015 yang berlangsung antara Iran dengan negara 5+1 yaitu Amerika Serikat, Inggris,

²⁹ Resty Meiva Rizky, perubahan kebijakan nuklir iran di era pemerintahan Hassan Rouhani, <https://media.neliti.com/media/publications/32789>

³⁰ Elizabeth, 2019, implikasi tindakan amerika serikat menarik diri dari joint comprehensive plan of action (jcpoa) dalam penyelesaian sengketa nuklir Iran. Hal 42 <http://e-journal.uajy.ac.id/21977/2/160512593.pdf>

Cina, Rusia, Perancis dan Jerman. Kesepakatan Wina menghasilkan kesepakatan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (*Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA*) yaitu pengakuan kekuatan-kekuatan dunia terhadap hak-hak nuklir bangsa Iran. nuklir Iran tidak ada yang dihentikan aktivitasnya. Semua aktivitas instalasi nuklir Iran tetap berlanjut, termasuk di daerah Natanz dan Fordow. JCPOA menjamin kelanjutan program pengayaan Uranium di Iran. perjuangan pemerintah Iran dalam meyakinkan dunia internasional untuk pengembangan nuklirnya, serta tuduhan dan desakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui IAEA untuk menghentikan pengembangan yang dilakukan, peneliti tertarik untuk melihat diplomasi yang dilakukan Iran kepada IAEA untuk mendapatkan persetujuan dalam pemanfaatan energi nuklir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut : Bagaimana peran diplomasi Iran dalam menghadapi tekanan Internasional atas pengembangan nuklir Iran?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan, diantaranya : Untuk mengetahui kebijakan yang dihasilkan terhadap perjanjian nuklir Iran melalui diplomasi pemerintah Iran dengan Internasional mengenai pengembangan nuklir dan apa saja yang dihasilkan dalam kesepakatan nuklir Iran melalui JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) dan dampaknya terhadap program pengembangan nuklir Iran.

1.4. Kerangka Dasar Teori

Diplomasi diyakini bersal dari kata Yunani yaitu *diploun* yang berarti melipat. Menurut Nicholson, pada masa kekaisaran Romawi, semua paspor yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam double, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan ini disebut *diplomas*. Selanjutnya inilah yang berkembang dan menyangkut dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing yang diluar bangsa Romawi. Surat resmi negara ini dikumpulkan, disimpan menjadi arsip, yang berhubungan dengan hubungan internasional dikenal pada jaman pertengahan sebagai *diplomaticus* atau *diplomatique*.³¹

Para pakar memberikan pengertian yang berbeda terhadap kata diplomasi. Menurut *the Oxford English Dictionary*, diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselenggarakan dan diatur oleh duta besar dan para wakil. Bisnis atau seni para diplomat. Sir Ernest Satow dalam karyanya yang berjudul *A Guide to Diplomatic Practice* mendefinisikan diplomasi sebagai berikut :

“ *Diplomacy is the Application of Intelligent and tact to the conduct of official relation between the government of independent states* “³²

Dengan artian diplomasi sebagai aplikasi inteligen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang bisa saja diperluas dengan hubungan negara jajahannya. Ahli pakar lain juga memberikan pandangan

³¹ Harold Nicholson, *Diplomacy*, penerbit (London Oxford University Press), 1942 hal 13-15

³² Sir Ernest Satow, 1961, *A Guide to Diplomatic Practice*, Edited by Sir Neville Bland, Logman dalam Suwardi Wiriatmaja, pengantar ilmu hubungan internasional (Surabaya: Pustaka Tinta mas, 1967) hal 164

tentang diplomasi. Baston, menurutnya diplomasi adalah manajemen hubungan antara negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan secara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.³³ Menurut Hans Morgenthau, Tujuan utama dari diplomasi adalah memajukan kepentingan nasional melalui sarana perdamaian.³⁴ Untuk mencapai tujuan utama-utama tersebut harus menggunakan cara-cara yang tepat. Cara-cara dalam diplomasi untuk mencapai tujuan-tujuan itu terdapat tiga macam : persuasi, kompromi, ancaman senjata militer³⁵. Cara-cara Persuasi merupakan cara meyakinkan dan membujuk serta mengajak secara lunak dan tanpa ada unsur kekerasan dengan memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan agar sikap, tindakan dan kebijakan negara lain terpengaruh dan berubah.³⁶ sedangkan cara-cara kompromi adalah cara penyelesaian dalam suatu perselisihan dengan jalan persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara mengorbankan sebagian dari tuntutan masing-masing, ataupun tawar-menawar, bekerja sama dan kongkalikong.³⁷ Sedangkan cara diplomasi yang terakhir adalah ancaman, merupakan cara mempengaruhi negara lain melalui kekerasan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai hal dan bidang.

³³ R.P Baston, *Modern Diplomacy*, N.Y : Longman dalam Sukawarsini Djelantik, 2008, *Diplomasi antara teori dan praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 1997) hal 4

³⁴ Hans J. Morgenthau, *politik antar bangsa*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia) hal 296

³⁵ Sukarwarsini Djeletik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) hal 14

³⁶ B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007) hal 338

³⁷ *Ibid* Hal 339

Sukawarsini Djelatik juga memandang bahwa Diplomasi pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi dan menyelesaikan masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tidakana tujuan, dan sikap pemerintah negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persusasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi atau mengirimkan ancaman.³⁸

a. Diplomasi Bilateral

Diplomasi Bilateral adalah diplomasi yang dilaksanakan oleh dua belah pihak atau negara pada satu waktu serta dengan misi yang diakui secara resmi. Salain itu, diplomasi ini juga memiliki fleksibilitas dan apat mempermudah dalam mencapai sebuah kesepakatan dalam diplomasi multilateral yang telah mecapai kebuntuan untuk mencapai kesepakatan bersama.³⁹

a. Diplomasi Multilateral

Diplomasi Multilateral merupakan diplomasi yang melibatkan banyak aktor atau lebih dari dua aktor yang memiliki kepentingan yang sama. Diplomasi multilateral juga lebih berfokus pada satu permasalahan. G.R. Berridge menjelaskan bahwa diplomasi multilateral adalah jika peran residen duta besar secara subtansi dimodifikasi selama abad ke duapuluh, ini setidaknya sebagian karena ledakan dalam jumlah banyak konferensi

³⁸ Sukarwarsini Djelatik, Op-Cit hal 4

³⁹ E jurnal hubungan internasional, (Astella Claudia Hengkey 2021) Diplomasi Amerika Serikat tentang perjanjian nuklir dalam pembentukan Joint Comperhensive Plan of Action dengan Iran 2013-2015. <http://www.ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id>

yang dihadiri oleh tiga atau lebih negara, sebuah ledakan yang dapat dikatakan sebagai diplomasi multilateral.⁴⁰

Pada penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana peran negara Iran dalam mempertahankan nuklir dengan media diplomasi yang mempengaruhi berlangsungnya implementasi dari JCPOA

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan, metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data yang dicari dan ditulis dalam penulisan ilmiah itu sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari data sumber informasi yang mendukung dan relevan untuk diteliti. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal dan sumber lain. Kemudian penulis melakukan proses analisis dan interpretasi data tersebut dengan tujuan penelitian.

1.6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana bagaimana data penelitian dikembangkan dan diolah kedalam kerangka kerja sederhana : Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif, yaitu mengembangkan mengenai diplomasi yang dilakukan Pemerintah Iran dengan Internasional dalam pembentukan kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* terhadap pengembangan nuklir. Jenis data pada pengumpulan ini adalah sekunder dengan berbagai sumber, teknik pengumpulan data melalui *Library risech* dan buku, jurnal dan internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis

⁴⁰ Ibid Hal 57

kualitatif dengan berfokus pada penarikan dari kesimpulan umum ke khusus mengenai diplomasi Pemerintah Irak terhadap tekanan Internasional..

